



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIDWAN SAPTOTO
2. Jabatan : KETUA PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI (PAW)
3. NHK : 1000448

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	350.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 223 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	31.000.000
1. MOTOR, HONDA SUPRA X (SECOND) Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000		
4. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	22.200.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	200.010.601
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.592.257.212
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.195.467.813
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.195.467.813

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.